



Buletin

Edisi, 302
Desember 2019

Isen Mulang

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

LA EKA HAPAKAT

ntor Gubernur Kalteng

aya, 18 November



Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi
Publik Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Penyaringan Informasi
dan Publikasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Informasi
Pemerintahan dan Umum pada Biro
Protokol dan Penyaringan Informasi
dan Publikasi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Media dan
Dokumentasi pada Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Informasi
Ekonomi, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol
dan Penyaringan Informasi dan
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Staf Pelaksana :

Mulyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,
Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito
Zuares

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya
Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Daftar Isi :

Presiden : SDM UNGGUL MENJADI LANDASAN
PRIORITAS BELA NEGARA___3

Presiden RI : Pengabdian KORPRI Tegak Lurus
Terhadap Bangsa dan Negara___5

387 PNS PEMPROV KALTENG TERIMA
SATYALANCANA KARYA SATYA___6

Gubernur Kalteng : P3MD Sebagai Instrumen
Keberhasilan Pembangunan___7

Sekda Kalteng : RAD GRK Diharapkan Lebih Ramah
Lingkungan___8

BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja
Semester I dan II___8

Pemprov Kalteng Dukung Upaya Menggali Potensi
Zakat, Infaq dan Shodaqah___9

Sekda Kalteng : Tim KPRD Lapor Kinerjanya Secara
Berkala Kepada Gubernur___9

Utut Adianto : Kemudahan Investasi Harus
Memperhatikan Pembatasan Agar SDA Tidak dikuasai
Asing.___10

IAIN Palangka Raya Mewisuda Sarjana dan
Magister___11

Pemprov Kalteng Berkomitmen Tingkatkan Kualitas
SDM Pemuda___11

Pasokan dan Harga Bahan Pokok Strategis Jelang
Natal Dan Tahun Baru Stabil___12

Wagub Kalteng : Pelaku UMKM Harus Cepat
Beradaptasi Dengan Teknologi___13

Gubernur : Pemberdayaan UMKK dan Ekonomi
Syariah Menjadi Sektor Unggulan___14

Kalteng Luncurkan Program "Bangun Hutan Rakyat,
Sejahterakan Rakyat"___15

PHI 2019 Dorong Perempuan Berdaya Untuk
Indonesia Maju___16

NATAL Gabungan KORPRI, PHBK dan DAD Kalteng
2019___17

GKE Gelar Natal Nasional Pertama 2019 Di Palangka
Raya___18

Gubernur Harapkan DWP Kalteng Dapat Menjadi
"Center of Excelent"___19

Jalan Sehat GERMAS Meriahkan HKN Tingkat Provinsi
Kalteng 2019___19



biropkp.kalteng.go.id



sekretariat.daerah.kalteng



@biropkp_kalteng



protokol komunikasi publik kalteng



buletin.isenmulang@gmail.com

Presiden : SDM UNGGUL MENJADI LANDASAN PRIORITAS BELA NEGARA.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Upacara Peringatan Ke-74 Hari Bela Negara Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang diikuti PNS, Pelajar dan Mahasiswa, Organisasi Masyarakat dan Ormas Pemuda dengan Inspektur Upacara Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Kamis (19/12/2019).

Pada Apel Bela Negara tersebut Presiden RI Joko Widodo dalam amanat tertulisnya disampaikan Gubernur Sugianto Sabran mengingatkan kembali fakta sejarah yaitu semenjak Mr. Syafrudin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi guna membela kelangsungan hidup bangsa dan negara, munculah berbagai wujud bela negara yang susul-menyusul dan silih berganti untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dan akan terus eksis untuk selama – lamanya.

Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara kita semakin hari semakin berat dan beragam bentuknya. “Dengan beragam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi bangsa ini, disinilah terletak relevansi tekad kita untuk mewujudkan SDM Unggul demi kemajuan Indonesia yang kita canangkan sebagai tema Peringatan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ke-74 tahun 2019. Manusia Indonesia yang unggul adalah prasyarat utama untuk mengisi Kemerdekaan sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang. Kemerdekaan ini jualah yang menjadi pedoman bagi kita



semua untuk melaksanakan bela negara”, tegas Presiden dalam amanatnya.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan nilai dasar

bela negara serta merupakan visi final bangsa dan negara Indonesia yang menghendaki pembangunan manusia paripurna. Manusia paripurna tidak hanya memiliki kapasitas dan keterampilan yang tinggi untuk



pemenuhan kebutuhan sendiri dan golongannya, melainkan mensyukuri berkah kebhinekaan dan mensinergikan beragam kekuatan, siap menghadapi interaksi dan persaingan global yang semakin kompetitif serta menginsyafi dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang menjadi landasan prioritas bela negara untuk pembangunan SDM unggul yang diarahkan kepada perwujudan manusia Indonesia paripurna berdasarkan Pancasila.

“Sejalan dengan itu, pada tahun 2018 Saya telah menginstruksikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara di berbagai bidang dan tataran di seluruh Indonesia dengan melibatkan segenap jajaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta berbagai elemen masyarakat sebagai wujud apresiasi atas berbagai keahlian manusia Indonesia”, ungkap Presiden Joko Widodo.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Aksi Nasional Bela Negara juga melengkapi keahlian SDM kita dengan pengamalan nilai-nilai bela negara yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan dan keyakinan kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara dan semangat untuk mewujudkan negara yang

berdaulat, adil dan makmur.

Aktualisasi bela negara harus disesuaikan dengan kondisi kekinian yang dihadapi oleh masyarakat secara umum serta dilandasi sinergi semua pemangku kepentingan sehingga terwujud kekuatan besar untuk mencapai tujuan yang besar sehingga bela negara bukan hanya menjadi alat untuk menghadapi ancaman yang bersifat potensial maupun aktual, namun juga menjadi alat pencapaian tujuan nasional bangsa dalam jangka panjang yang memerlukan kerja keras serta sinergi bersama secara terus menerus.

“Dalam beberapa tahun yang lalu kita telah dan akan terus membangun segala infrastruktur yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. Mencetak lapangan kerja, mendorong peningkatan Sumber Daya Pembangunan dan mereformasi birokrasi pemerintahan. Namun sekali lagi, faktor yang paling utama tetaplah SDM yang unggul demi kemajuan Indonesia” ujar Jokowi.

Pada Peringatan Ke-71 Hari Bela Negara tahun 2019 Presiden kembali menekankan tanpa adanya sikap dan perilaku bela negara maka pengelolaan negeri kita yang besar dan luas dengan sumber daya alamnya yang melimpah, tidak akan mencapai keadilan dan kemakmuran yang di cita-citakan oleh seluruh pendahulu bangsa. Karena itu penanaman nilai-nilai dasar bela negara harus

dilakukan secara terus menerus kepada seluruh komponen masyarakat dari beragam profesi tanpa memandang usia, suku, agama dan ras sebagai hak dan kewajiban tiap warna negara yang dijamin oleh undang-undang. “Kedepannya, kita semua mengharapkan agar Aksi Nasional Bela Negara di segenap gatra kehidupan nasional dapat semakin terstruktur, sistematis dan massif dengan prioritas dan implementasi yang terukur sesuai dengan persepsi dan aspirasi masyarakat seluas-luasnya”, beber Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengakhiri amanatnya pada Peringatan Hari Bela Negara 2019 berpesan agar birokrasi pemerintahan teruslah mereformasi diri serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. “Yang belajar dan mengajar, teruslah meningkatkan kearifan dan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai kebangsaan kita. Yang mengabarkan berita, teruslah menjadi penerang informasi masyarakat secara jujur, berimbang dan bertanggung jawab. Yang menjalankan usaha, tingkatkanlah terus daya saing secara sinergis dengan segenap tujuan negara. Demikian pula segenap masyarakat dengan beragam profesinya, jadikan bidang profesi masing-masing sebagai lading bela negara”, kata Joko Widodo. ***

Presiden RI : Pengabdian KORPRI Tegak Lurus Terhadap Bangsa dan Negara.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) harus mampu mewujudkan jiwa Korps Aparatur Sipil Negara yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Jiwa korps ini harus terus dijaga meskipun dalam suasana politik apapun karena KORPRI bukan organisasi politik, tetapi merupakan organisasi kedinasan yang berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan setiap target dan tujuan yang sudah ditetapkan dapat terwujud dengan baik.

“Saya minta anggota KORPRI untuk terus fokus, tetap fokus dan selalu fokus pada pencapaian tujuan bernegara, karena pengabdian setiap anggota KORPRI adalah tegak lurus terhadap bangsa dan bernegara”. Demikian pesan Presiden RI Joko Widodo dalam sambutan tertulis disampaikan Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri pada Upacara HUT Ke-48 KORPRI 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Halaman Kantor Gubernur, Senin (02/12/19).

Presiden kembali mengingatkan bahwa harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik akan semakin tinggi. Untuk memenuhi harapan itu maka setiap anggota KORPRI harus memiliki karakter dasar sebagai birokrat yang melayani

serta berkarya bagi Bangsa dan Negara. “Gen sebagai pelayan masyarakat harus ditanamkan kuat-kuat dalam hati sanubari dan diwujudkan menjadi perilaku yang melayani secara professional”, jelas Presiden Jokowi.

Dengan teknologi yang semakin canggih maka cara bekerja ASN juga harus berubah mengingat kecepatan merupakan faktor kunci kesuksesan dalam berkarya. “ Yang cepat akan mengalahkan yang lambat, kita tidak boleh lagi menyelesaikan masalah saat ini dengan cara-cara masa lalu. Masalah saat ini harus kita selesaikan dengan cara kekinian yang lebih cepat, lebih efisien dan memberi dampak luas dan jangka panjang,” tegas Presiden.

Untuk itu kepada anggota KORPRI yang tersebar di seluruh Indonesia diminta menjadi garda terdepan dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Menggaungkan kesadaran kita sebagai bangsa yang besar dan bangsa pemenang. Setiap anggota KORPRI juga harus mampu menebarkan optimisme dalam setiap gerak langkahnya.

Selain itu, Presiden mengajak seluruh anggota KORPRI mencari terobosan dan melakukan inovasi sebagai ruh birokrasi. Pemerintah saat ini telah menerapkan e-Government.

Pemerintah yang berbasis elektronik diyakini mampu memberi pelayanan lebih baik, lebih cepat dan lebih murah serta mampu meminimalkan praktek korupsi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan cara pandang, sikap dan tindakan dalam melayani, bersikap netral, merekatkan persatuan, bertindak tertib serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Presiden juga mengharuskan semua anggota KORPRI memiliki media sosial untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. “Saya berpesan pada anggota KORPRI milenial untuk melakukan inovasi sehingga dapat memberi layanan yang baik, cepat dan mudah, jangan hanya puas sudah menjadi ASN”, pungkas Presiden.

Upacara Peringatan HUT Ke-48 KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2019 dengan Tema Melayani, Berkarya dan Menyatukan Bangsa ini diikuti ASN lingkup Pemprov Kalteng dan Unsur Forkompimda. Sekda Kalteng Fahrizal Fitri se usai upacara, menyerahkan secara simbolis pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiunan dan Taspen Life kepada 7 orang ASN yang purna tugas serta piala kepada 6 ASN pemenang lomba pengucapan Panca Prasetya KORPRI dalam rangka Peringatan HUT KORPRI 2019. ***



387 PNS PEMPROV KALTENG TERIMA SATYALANCANA KARYA SATYA



.PALANGKA RAYA – BIRO PKP. 387 Orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima tanda kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA 10, 20 dan 30 tahun.

Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tersebut masing-masing kepada 105 orang PNS yang sudah mengabdikan selama 30 tahun, 121 PNS yang sudah mengabdikan 20 tahun dan 161 PNS yang sudah mengabdikan diri sebagai PNS selama 10 tahun di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.

“Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini jangan dipandang sebagai kegiatan seremonial belaka. Sebaiknya peristiwa ini dijadikan momentum untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja Saudara kepada bangsa dan negara terkhusus

bagi Kalimantan Tengah, sehingga sudah sepantasnya penghargaan ini diterima dengan rasa syukur dan sukacita serta rasa bangga, karena Saudara-Saudara dinilai telah berbakti selama 10, 20 dan 30 tahun lebih secara terus-menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian”, tegas Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya pada acara Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 387 PNS di Aula Eka Hapakat Palangka Raya, Selasa (17/12/2019).

Wagub Habib Ismail Bin Yahya juga berharap agar tanda kehormatan itu dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, serta digunakan sebagaimana mestinya agar ke depannya melalui momentum tersebut PNS dapat menambah kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas melayani masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata

sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

Wagub mengingatkan kepada para penerima tanda penghargaan tersebut agar jangan sampai ada anggapan bahwa tanda kehormatan ini hanya dipakai saat penganugerahan saja. Sesungguhnya penghargaan ini mengandung makna kebanggaan serta kewajiban untuk menjaga dan mempertahankannya yang tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Saya mengucapkan selamat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara-Saudara. Saya berharap agar kinerja serta pengabdian Saudara terus ditingkatkan sehingga kinerja Instansi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat, maju menuju KALTENG BERKAH”, kata Wagub Habib Ismail Bin Yahya.***

Gubernur Kalteng : P3MD Sebagai Instrumen Keberhasilan Pembangunan

Palangka Raya – Biro PKP. Berbagai upaya dilakukan untuk menyukseskan pembangunan desa antara lain melalui Jambore Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dinilai memiliki makna strategis karena mencakup keberadaan Para Pendamping Desa. Tenaga Pendamping Desa merupakan salah satu instrumen penting dan garda terdepan dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan di Desa.

Para Pendamping Desa di Kalimantan Tengah tersebar di 1.433 desa pada 131 Kecamatan dalam 13 Kabupaten adalah modal dan kekuatan besar untuk melaksanakan pembangunan Kalimantan Tengah.

Aktivitas Para Pendamping Desa yang siap dan harus berbaur dalam mendampingi masyarakat dan aparatur desa menjadi sangat strategis dalam mempercepat akselerasi pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah. “Saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional yang selama ini telah bekerja keras, tulus dan tanpa pamrih serta berpartisipasi aktif dalam mendampingi masyarakat dan aparatur desa. Hal itu sebagai upaya bersama untuk mensukseskan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai bersama”, kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Plt. Asisten Administrasi Umum

Sekda Kalteng Kaspinor di hadapan peserta Jambore Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (26/11/2019).

Gubernur mengajak seluruh Tenaga Pendamping Profesional di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah agar terus berkarya semaksimal mungkin dalam mendukung dan mengisi pelaksanaan pembangunan sehingga program P3MD dapat terus dipacu seiring dengan dinamika pembangunan serta dapat diselaraskan dengan perkembangan kebijakan pemerintah daerah yang sedang dan akan dilaksanakan. “Saya berharap agar pendampingan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi pioner utama dan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan serta dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kalimantan Tengah”, terang Sugianto Sabran.

Disebutkan, tahun 2019 merupakan tahun ke - 5 penyaluran Dana Desa sebagai bentuk perwujudan amanat Undang Undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa. Selama lima tahun Dana Desa dikurirkan secara bertahap telah membawa dampak positif dan terjadi beberapa perubahan mendasar di desa. Perbaikan tata kelola pemerintahan serta keuangan dan pembangunan di berbagai sektor termasuk pemberdayaan masyarakat desa perlahan namun pasti mulai dirasakan terjadi

perubahan oleh masyarakat desa. Namun persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial dan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat pedesaan menjadi persoalan sekaligus tantangan bagi pelaku, pendamping, pengawas dan pembina program di daerah tugas masing-masing.

“P3MD sangat sejalan dengan Visi Misi saya sebagai Gubernur dan Habib Ismail sebagai Wakil Gubernur, khususnya pada misi ke 4 yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan instrumen yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi masyarakat pedesaan melalui pembangunan dan pemberdayaan, merupakan program prioritas dan komitmen pemerintah daerah saat ini”, tegas Gubernur.

Kesamaan dalam menjalan visi dan misi tersebut membuat seluruh capaian pembangunan di Kalimantan Tengah terutama yang terkait dengan Dana Desa dapat dibilang berhasil, karena dukungan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mempercepat seluruh proses tahapan Dana Desa sampai pada tahap pelaksanaan di desa masing-masing. Hal ini sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju KALTENG BERKAH.***

Sekda Kalteng : RAD GRK Diharapkan Lebih Ramah Lingkungan

PALANGKARAYA—Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) tahun 2019 dan Draft Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Dokumen DDDTLH akan digunakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengharapkan semua pihak dapat bekerjasama menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang lebih ramah lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Fahrizal Fitri menekankan hal tersebut di depan peserta Konsultasi Publik Implementasi Strategi REDD + (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) atau penurunan emisi dari Deforestasi dan Pengrusakan Hutan dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Swiss Belhotel

Danum Palangka Raya, Selasa (17/12/2019).

Dijelaskan, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sudah menyusun dokumen RAD GRK tahun 2012. Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah memiliki dokumen Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP) tentang REDD+ yang disusun tahun 2013. Dalam dokumen SRAP tersebut sudah disusun rencana pengarusutamaan Strategi Rencana Aksi Daerah (STRADA) REDD+ Kalimantan Tengah yang meliputi pelaksanaan perubahan paradigma dan budaya kerja substansial dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi karbon melalui pengelolaan sumber daya hutan dan lahan gambut ke arah yang berkelanjutan.

Fahrizal mengatakan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sudah mengeluarkan SK Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Forest Reference Emission Level (FREL) Sub Nasional (Provinsi). "Peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi GRK sampai tahun 2020," terang Fahrizal.

Provinsi Kalimantan Tengah

mendapat alokasi emisi melalui deforestasi sebesar 22.318.952 ton CO2 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal PPI tersebut. Dengan alokasi emisi melalui deforestasi itu provinsi Kalimantan Tengah relatif lebih mudah dalam merencanakan penurunan emisi berbasis lahan.

Fahrizal berharap dengan dilaksanakannya Konsultasi Publik tentang SIS REDD+ dan Strategi Aksi Implementasi REDD+ serta penyampaian draft RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah ini membuka ruang bagi para pihak untuk saling berdiskusi, memberikan masukan, belajar bersama tentang proses penyusunan dokumen SIS REDD+, Strategi Rencana Aksi REDD+ dan mengetahui draft dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah.

Konsultasi Publik ini dihadiri Pjt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Perwakilan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan INOBU Bernadinus Steni dan perwakilan Yayasan Climate Society M. Ardiyansyah.***

BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Semester I dan II.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Semester II dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Semester II dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Pemerintah Provinsi Kalteng 2019 itu diserahkan BPK RI Perwakilan Kalteng kepada Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri di Auditorium BPK RI Perwakilan Kalteng, Rabu (13/12/2019).

Gubernur Kalteng

dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Fahrizal Fitri menyampaikan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Prov. Kalteng atas bimbingan dan arahannya terutama dalam hal pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia. "Semoga dengan hasil pemeriksaan kinerja Bidang Pendidikan ini dapat meningkatkan efektivitas dan sebagai dasar acuan perbaikan mutu pembelajaran dan kesiapan

pengawas, Kepala Sekolah dan Guru serta media pembelajaran untuk sepenuhnya mendukung penerapan kurikulum 2013 dan bisa mendapatkan manfaat bagi Daerah Prov. Kalteng yang kita cintai ini", kata Gubernur.

Menurut Sugianto Sabran, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah akan berupaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang lebih efektif.***

Pemprov Kalteng Dukung Upaya Menggali Potensi Zakat, Infaq dan Shodaqah

PALANGKA RAYA—Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendukung upaya dan inovasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menggali potensi zakat, infaq dan shodaqah.

Dukungan pemerintah tersebut berkaitan dengan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih rendah sehingga diyakini menjadi faktor penyebab belum optimalnya potensi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) di Kalimantan Tengah, padahal sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya mengemukakan hal itu ketika membuka Sosialisasi Instruksi Gubernur Nomor : 330/I.09/Kesra/2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan ZIS dari ASN Beragama Muslim di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (23/12/2019).

Wakil Gubernur mengatakan zakat, infaq maupun shodaqah juga bermakna sosial. “Zakat, infak, maupun shodaqah menjadi instrumen keadilan dengan memberikan sebagian harta guna menolong orang-orang yang tidak mampu, menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat,” jelasnya.

Habib Ismail Bin Yahya juga menegaskan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama yakni upaya mendorong kesadaran berzakat, infaq dan shodaqah bagi umat Islam melalui BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah serta memperkuat kelembagaan

zakat beserta tenaga SDM-nya dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Wagub berharap kepada seluruh pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah agar senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi atau lembaga pemerintah, perbankan maupun wirausaha untuk meningkatkan optimalisasi pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah. “Dengan demikian keberadaan dan fungsi BAZNAS mampu berpartisipasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat serta mampu menjadi bagian dalam mewujudkan masyarakat Kalteng BERKAH di Bumi Tambun Bungai,” imbuhnya.***

Sekda Kalteng : Tim KPRD Laporkannya Secara Berkala Kepada Gubernur

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Kalimantan Tengah adalah tim ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Di Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

Pembentukan TKPRD Kalimantan Tengah tersebut berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/55/2018 tanggal 21 Maret 2018. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng terus berupaya meningkatkan dan mengevaluasi kinerjanya. Pada Rapat Koordinasi TKPRD se-Kalteng di Palangka Raya, Rabu (18/12/2019) dibahas berbagai

permasalahan tata ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng beserta pemecahan masalah atau solusinya.

Sekda Kalteng dalam sambutan tertulis disampaikan Asisten II Sekda Kalteng Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy ketika membuka Rakor tersebut menegaskan kepada TKPRD agar menyampaikan laporan secara berkala kepada gubernur tentang penataan dan pembinaan tata ruang. “TKPRD dalam melaksanakan tugasnya harus menyampaikan laporan berkala kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur melaporkan pelaksanaan penataan ruang daerah dan pembinaan penataan ruang Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling

sedikit 1 kali dalam 1 tahun pada bulan September. Hal tersebut sudah kita laksanakan,” jelas Nurul Edy.

Demikian juga kepada tenaga ahli diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi penyelesaian tata ruang yang saat ini masih dihadapi Kalimantan Tengah dan seluruh TKPRD Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah juga diharuskan menyampaikan laporan perkembangan TKPRD Kabupaten/Kota di daerahnya masing-masing.

Rakor TKPRD yang dihadiri Tim Pengarah, Tenaga Ahli Tata Ruang Provinsi Kalteng serta TKPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalteng itu antara lain mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) RTRWP Kalteng Tahun 2015-2035 dan launching Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru) Provinsi Kalimantan Tengah.***

Utut Adianto : Kemudahan Investasi Harus Memperhatikan Pembatasan Agar SDA Tidak dikuasai Asing.

PALANGKARAYA—Biro PKP. Sejumlah Anggota Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memberikan perhatian terhadap sejumlah permasalahan yang disuarakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Dengar Pendapat Umum tentang Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (19/2/2019).

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan sejumlah permasalahan tersebut berkaitan dengan pembangunan pariwisata, investasi, sanksi bagi pembakar hutan, Ibukota Negara dan kebijakan pusat yang mendorong perkembangan di daerah. “Kaitan utamanya dengan keamanan, tetapi kita tidak hanya berfokus pada itu. Ada 5 pesan dari teman-teman yang akan dibawa ke Jakarta. Yang pertama adalah pariwisata. Kenapa Kalteng tidak dimasukkan menjadi salah satu kawasan strategis nasional, karena di sini juga banyak sekali sumbernya,” kata Utut Sugianto.

Fokus permasalahan

berikutnya adalah kemudahan berusaha. Kemudahan investasi harus tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan tertentu untuk mengantisipasi penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing. “Tentu harus ada restriksi-restriksinya, termasuk orang yang ingin menjadi WNI karena disinyalir dengan modus menjadi WNI ini juga untuk menguasai sumber daya alam. Tapi, restriksi-restriksi yang sifatnya rigit untuk hal-hal yang strategis oleh Dirjen Imigrasi jangan sampai membuat kondisi investasi menurun,” jelas Utut.

Demikian juga soal perambah hutan yang membuka lahan melalui pembakaran yang dikenakan sanksi. Pemerintah Pusat diminta membedakan antara petani yang turun-temurun memiliki kearifan lokal membuka lahan melalui pembakaran dengan pihak-pihak yang membakar lahan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kelestarian alam. “Harus dibedakan yang memang pekerjaan turun-temurun semata-mata untuk kehidupan atau yang memperkaya diri. Itu idealnya juga ada pertimbangan tertentu,” tegas Utut.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengungkapkan bahwa potensi sumber daya alam Kalimantan Tengah telah

meningkatkan perhatian atau kepentingan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri terhadap Kalimantan Tengah. Untuk itu perlu adanya upaya penanganan terhadap potensi ancaman yang mungkin terjadi dan sikap waspada secara proporsional oleh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. “Terjaganya situasi wilayah yang aman dan kondusif melalui upaya-upaya deteksi dan cegah dini dengan meminimalisir potensi kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, bukan menjadi tugas aparat keamanan saja. Namun, diperlukan sinergisitas antara pemerintah, pemerintah daerah, aparat intelijen, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat”, terang Sugianto Sabran.

Gubernur berharap kunjungan Komisi I DPR RI dapat memberikan perhatian dan masukan kepada pemerintah dan masyarakat Kalimantan Tengah. “Kami berharap Komisi I DPR RI dapat memberikan perhatian, bantuan dan masukannya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tujuan pembangunan nasional dalam bingkai NKRI dapat kita wujudkan,” ujar Sugianto.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah itu juga dihadiri Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya, Forkopimda, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri dan sejumlah pimpinan Instansi Vertikal dan OPD terkait.***

IAIN Palangka Raya Mewisuda Sarjana dan Magister.

Palangka Raya – Biro PKP. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang pesat dan merambah di berbagai bidang kehidupan pribadi, kelompok, organisasi swasta dan pemerintah.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari peran dan kontribusi Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan seperti IAIN Palangka Raya di bidang pendidikan. “Saya memberikan apresiasi dan terus mendukung Perguruan Tinggi yang komit dan konsisten memberikan kontribusinya terhadap pembangunan dunia pendidikan di Kalimantan Tengah”, ujar Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulis disampaikan Plt. Asisten III Sekda Kalteng Kaspinor pada acara Wisuda Sarjana dan Magister Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Palangka Raya, Rabu (4/12/2019).

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran optimis terhadap kemampuan Perguruan Tinggi jika disinergikan dengan potensi dan program pembangunan daerah akan mendapatkan hasil yang luar biasa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, SDM Kalteng yang mandiri dan berkarakter.

Demikian juga dengan eksistensi IAIN Palangka Raya akan semakin maju dan berkembang ketika semua fasilitas dan sarana/prasarananya bisa didayagunakan dengan baik dan optimal. “Bukan hanya kemajuan kelembagaannya, namun yang lebih penting adalah kemajuan dalam memberikan kontribusi besar bagi pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Tengah”,

ujar gubernur.

Para wisudawan merupakan bagian generasi penerus bangsa harus memiliki komitmen yang teguh untuk mengisi ruang dan mewarnai dinamika pembangunan di Kalteng. “Semakin banyak generasi muda yang siap terjun untuk mengabdikan di tengah-tengah masyarakat, maka barang tentu akan menjadi semakin berkembang pula provinsi Kalteng yang kita cintai ini”, imbu Sugianto.

Ditegaskan, Perguruan Tinggi terus menjadi mitra kerja pemerintah dalam menunjang berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah termasuk dalam mendukung dan menyukseskan terwujudnya Kalteng maju, mandiri dan adil bagi kesejahteraan dan kemakmuran segenap masyarakat menuju Kalteng BERKAH.***

Pemprov Kalteng Berkomitmen Tingkatkan Kualitas SDM Pemuda

PALANGKARAYA–Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan Organisasi Perangkat Daerah terkait, berkomitmen meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemuda Kalimantan Tengah. Peningkatan Kualitas Pemuda itu meliputi kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan ketrampilan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada dunia usaha dan industri untuk peningkatan kehidupan perekonomian pemuda.

“Pembangunan bidang kepemudaan harus dilakukan secara sinergis oleh Dispora dan OPD terkait, termasuk di antaranya dalam mencetak lulusan Perguruan Tinggi yang mampu menghadapi tantangan di era globalisasi, digitalisasi dan teknologi yang kini maju pesat”, kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan dibacakan Staf Ahli Gubernur

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yuel Tanggara ketika membuka Sosialisasi Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Tengah 2019 di Palangka Raya, Jumat (6/12/2019).

Disebutkan, Data Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Tengah tahun 2018 mencapai nilai 50,17 atau pada peringkat ke - 19 dari 34 Provinsi di Indonesia. “Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Tengah ini bisa meningkat kalau semua Kabupaten dan Kota bersama-sama bergerak maju membangun kepemudaan dengan meningkatkan program kegiatan dan anggaran kepemudaannya”, terang Gubernur.

Untuk itu Sugianto Sabran meminta Bupati dan Walikota agar mempelajari dan mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor : 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan. “Saya berharap Bupati dan Walikota mempelajari Perpres tersebut, cermati dengan baik dan implementasikan dalam kebijakan terkait program kepemudaan di daerah masing-masing,” tegas Sugianto Sabran.

Bupati dan Walikota juga diminta meng-update data kepemudaan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. “Begitu juga OPD terkait di Provinsi harus pro aktif menghimpun data kepemudaan dari Kabupaten/Kota,” imbu Gubernur seraya menjelaskan beberapa faktor penting dalam meningkatkan kualitas pemuda untuk mendukung data kepemudaan sebagai kriteria dalam menentukan IPP di suatu daerah.

Sosialisasi Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Tengah tahun 2019, dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora RI Esa Sukma Wijaya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Kalimantan Tengah.***

Pasokan dan Harga Bahan Pokok Strategis Jelang Natal Dan Tahun Baru Stabil.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Stabilitas harga bahan pokok di Kalimantan Tengah menjelang akhir tahun 2019 masih relatif terkendali. Harga bahan pokok yang relatif terkendali itu karena sinergitas pihak terkait berjalan cukup baik. Meskipun harga terkendali, namun ada beberapa hal yang masih menjadi perhatian pemerintah antara lain produk-produk yang bergantung musim mengingat Kalteng masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.

Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengemukakan hal tersebut ketika membuka Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Aula Eka Hapakat Palangka Raya, Senin (16/12/2019).

Rakorgab tersebut mengupayakan langkah-langkah antisipasi secara dini dan terkoordinasi melalui kebijakan yang tepat sehingga tidak terjadi gejolak di masyarakat akibat meningkatnya permintaan dalam menghadapi hari-hari besar

keagamaan nasional dengan sasaran mengamankan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis.

Disebutkan, harga sebagian besar bahan makanan hingga akhir November menunjukkan penurunan, kecuali komoditas daging ayam ras dan bawang merah yang menunjukkan kenaikan harga. Harga daging ayam ras, bawang merah dan beras selama triwulan IV menunjukkan tren kenaikan dan rawan terjadi tekanan inflasi. “Situasi terkait dengan kenaikan harga beberapa bahan pokok tersebut akan menjadi perhatian dan akan terus dijaga agar tidak naik, tetap stabil harganya hingga Natal dan tahun baru 2020 dan seterusnya,” ujar Sekda.

Untuk itu diharapkan Dinas terkait termasuk Tim TPID dan Satgas Pangan tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota tetap proaktif memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok serta memberikan informasi terkini. Sekda menambahkan perlunya upaya antisipasi dini melalui kebijakan yang tepat agar tidak

terjadi gejolak di masyarakat akibat permintaan yang meningkat menghadapi hari besar keagamaan nasional.

Fahrizal Fitri juga mengharapkan keberadaan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang diresmikan Agustus lalu untuk meningkatkan efisiensi pasokan pangan dari produsen di wilayah sentra ke TTI di wilayah konsumen. “TTIC harus segera mempersiapkan dan merencanakan pemenuhan ketersediaan pangan pokok strategis dan mengatur pendistribusian pangan melalui TTI ataupun langsung kepada masyarakat melalui Gelar Pangan Murah,” kata Sekda.

Rakorgab ini merupakan salah satu rencana aksi yang dilancarkan Badan Ketahanan Pangan Kementan RI di samping beberapa aksi lainnya seperti pemantauan pasokan dan harga pangan di pasar utama dan/atau wilayah sentra produksi, Gelar Pasar Pangan/OP/Bazaar H-3 s.d H+3, Subsidi Transportasi untuk Daerah Surplus ke Daerah Defisit, Optimalisasi Peran TTIC-BULOG Pusat & Daerah yang difokuskan pada 10 Provinsi Mayoritas yaitu Sumut, DKI Jakarta, Jateng, Bali, Kalbar, Kalteng, Sulut, Sulsel, NTT dan Maluku.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng selaku leading sektor kegiatan ini juga telah menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka mengamankan stabilitas harga dan pasokan bahan pangan antara lain Gelar Pangan Murah di Car Free Day Bundaran Besar yang melibatkan OPD lingkup Pemprov untuk berpartisipasi mengisi stand sebagai OPD penerima kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) yaitu Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan serta Dinas Perkebunan dan BPPT. ***



Wagub Kalteng : Pelaku UMKM Harus Cepat Beradaptasi Dengan Teknologi.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Sekitar 800 pelaku Usaha Kecil dan Makro (UKM) se-Kalimantan Tengah mengikuti Family Gathering UKM yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Makro Provinsi Kalimantan Tengah di GPU Tambun Bungai Palangka Raya, Kamis (10/12/2019).

Family Gathering UKM ini bertujuan meningkatkan silaturahmi dan bertukar informasi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaku Usaha Makro, Kecil dan Menengah di Kalimantan Tengah. Dalam Family Gathering tersebut juga dilakukan capacity building guna memantapkan mindset menjadi enterpreuner handal dengan tema “Membangun dan Melejitkan Usaha” yang menghadirkan motivator handal tingkat nasional Rizky Mahendra sebagai narasumber.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya ketika membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada pelaku usaha yang berpartisipasi dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalteng yang sudah mencapai 5,31 %, lebih tinggi

jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan nasional sebesar 5,02 %.

Habib Ismail Bin Yahya mengatakan kontribusi positif dari pelaku usaha perlu mendapatkan pembinaan dari berbagai pihak. “Saya berharap terbangun sinergi yang maksimal antara unsur pemerintah, lembaga keuangan seperti perbankan dan non-bank, BUMN dan BUMD serta peran media dapat optimal dalam mengekspose keberhasilan UMKM di Kalteng”, ujar Hibib Ismail.

Wagub menekankan kepada pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan teknologi di era digital dewasa ini. Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui teknologi digital sudah dimulai dari perijinan usaha mikro dan kecil sampai pemasaran online. “Pelaku usaha terus melakukan kegiatan usaha dengan lebih baik lagi karena pemerintah jelas berpihak kepada pelaku UMKM,” jelas Wagub.

Keberpihakan ini sudah nyata terbukti dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya disubsidi oleh pemerintah sehingga pelaku usaha hanya dikenakan 6 % mulai tahun 2020. Tahun 2019 suku

bunga KUR masih di angka 7 %. Demikian juga kucuran dana sudah disalurkan dari pemerintah pusat dan daerah maupun dari BUMN dan BUMD.

Untuk itu pentingnya motivasi dan semangat/spirit dari dalam diri pengusaha sebagai penggerak perilaku dalam menjalankan usaha. Nilai-nilai usahawan yang harus dimiliki antara lain percaya diri, berorientasi pada hasil, keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi pada masa depan serta kreatif dan inovatif. “Saya optimis industri kreatif lainnya pun dapat dikembangkan di Kalteng seperti produk fashion (busana bercorak khas Kalteng). Optimisme ini otomatis akan berpengaruh terhadap semakin cepatnya meraih Kalteng BERKAH,” ujar Wagub.

Kemampuan wirausaha yang masih lemah, hasil produksi yang belum memenuhi standard dan lemahnya memanfaatkan peluang pasar dapat diatasi dengan saling bersinergi dengan Perangkat Daerah terkait.

Dijelaskan, saat ini perijinan dan pemasaran telah ada peran konsultan pendamping yang melakukan pendampingan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan untuk pelatihan pemasaran produk sudah bersinergi dengan Diskominfoantik dan E-commerce Bukalapak, Tokopedia dan pasar digital lainnya.

Pada acara Family Gathering tersebut Wagub Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyerahkan bantuan dana bergulir dari General Manager Telkom Kalimantan Tengah kepada 3 pelaku usaha UMKM masing-masing sebesar Rp 100.000.000,-.***



Gubernur : Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Syariah Menjadi Sektor Unggulan.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Kalimantan Tengah memiliki potensi Sumber Daya Alam di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan dan pertambangan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi selalu lebih tinggi dibandingkan nasional sejak tahun 2008. Bahkan pertumbuhan ekonomi tahunan Provinsi Kalteng memasuki Triwulan III 2019 berada di angka 5,31 % (yoy) yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,02 % (yoy) sehingga Kalteng menjadi provinsi tertinggi ketiga tingkat pertumbuhan ekonominya di wilayah Kalimantan hingga triwulan III 2019.

Sementara tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kalteng relatif rendah yakni di bawah prosentase nasional. Tingkat kemiskinan Kalteng tersebut hingga Maret 2019 tercatat 4,98 %, lebih rendah dibandingkan nasional yakni 9,41 %. Kemudian tingkat pengangguran sampai Februari 2019 tercatat 3,33 %, lebih rendah dibandingkan nasional yaitu 5,01 %, sedangkan tingkat inflasi tahun berjalan sampai November 2019 sebesar 1,78 %, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,37 %.

Kondisi tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri ketika menghadiri Pertemuan Tahunan BI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (10/12/2019).

Gubernur menganggap masih perlu koordinasi lebih intensif dalam rangka pengendalian inflasi karena berbagai tantangan perekonomian ke depan mengharuskan adanya

upaya penurunan inflasi ke tingkat yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian. Hal ini sejalan dengan target inflasi yang ditetapkan pemerintah tahun 2020 sebesar kurang lebih 3 %, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. “Saya meyakini masing-masing Pemda di wilayah Kalimantan telah dan akan terus menjalin koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder terkait pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing,” tegas Gubernur.

Di Kalimantan Tengah disebutkan telah terbentuk 15 Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten dan Kota termasuk TPID Provinsi yang telah menunjukkan keseriusannya mengendalikan inflasi demi kesejahteraan rakyat.

Dijelaskan, perlambatan ekonomi global ke depan harus diantisipasi dengan mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru melalui pemberdayaan UMKM menjadi sektor unggulan dan ekonomi syariah agar inklusi keuangan Kalteng dapat ditingkatkan. “Melalui pertumbuhan ekonomi baru ini maka ketergantungan ekonomi Kalteng terhadap harga komoditas global dapat dikurangi sehingga terbentuk perekonomian yang lebih kokoh dan mampu bertahan di tengah perlambatan ekonomi global”, tegas Gubernur.

Selain itu, momentum transformasi digital harus dapat dimanfaatkan dan diintegrasikan dalam perekonomian provinsi Kalteng melalui digitalisasi berbagai aspek bisnis UMKM serta akses keuangan dan inovasi teknologi.

Gubernur menekankan beberapa tantangan yang dihadapi Kalteng dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru dan

transformasi digital tersebut. Pertama, penyediaan infrastruktur yang berkualitas, merata dan mendorong konektivitas dan ketercukupan energi. Kedua, mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap SDA dengan bertransformasi menuju perekonomian berbasis industri. Ketiga, penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi yang ramah investasi dan mendorong terciptanya lapangan kerja di Kalteng. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dalam hal kompetensi, keahlian dan penguasaan iptek.

Sementara itu Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalteng Rihando mengatakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tetap kuat dibutuhkan alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berbagai potensi dapat dioptimalkan seperti UMKM, wisata alam dan budaya serta ekonomi syariah. “Untuk itu dibutuhkan sinergitas, transformasi dan inovasi karena upaya pertumbuhan ekonomi baru tidak dapat terlaksana tanpa partisipasi masyarakat Kalteng. Pemerintah harus dapat merangkul semua elemen yang ada. Para pelaku usaha, asosiasi, instansi vertikal, akademisi dan masyarakat umum harus bersinergi membangun menuju KALTENG BERKAH,” tegasnya.

Pertemuan tahunan BI Perwakilan Kalimantan Tengah dengan thema “Sinergi, Transformasi dan Inovasi Menuju Indonesia Maju”, itu diikuti Pimpinan Perbankan di Kalteng, sejumlah Bupati di Kalimantan Tengah dan anggota Forkompimda. ***

Kalteng Luncurkan Program “Bangun Hutan Rakyat, Sejahterakan Rakyat”

Palangka Raya—Biro PKP. Isu tentang lingkungan yang saat ini menjadi perhatian seluruh negara-negara di dunia adalah terjadinya perubahan iklim yang cukup mengkhawatirkan dan timbulnya pemanasan global. Dampak yang mulai jelas terasa adalah semakin panjangnya musim kemarau dan makin pendeknya musim hujan serta terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi. Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat mendukung adanya usaha memperbaiki kondisi iklim dan mengatasi pemanasan global tersebut, sangat memerlukan adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa.

Musim kemarau yang cukup panjang tahun 2019 yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, sangat memberikan dampak yang cukup berat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Banyaknya titik api selama musim kemarau telah menunjukkan efek terjadinya pemanasan global yang dirasakan masyarakat Kalimantan Tengah.

Salah satu upaya untuk menekan pemanasan global tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan upaya memperbaiki lingkungan melalui gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon termasuk upaya rehabilitasi lahan secara kontinu dengan melibatkan peran serta warga masyarakat.

“Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari komponen bangsa yang peduli dengan kondisi tersebut telah melakukan berbagai langkah, diantaranya dengan menjadikan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai salah satu visi yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam masa jabatan pemerintahan kami untuk mendukung tercapainya Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang BERKAH”, ungkap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriatun pada Launching Program “Bangun Hutan Rakyat, Sejahterakan Rakyat” dan Program “Menanam Bersama Buatlah Bumi Tambun Bungai Tersenyum” di Taman Isen Mulang Palangka Raya, Kamis (05/12/19).

Program “Bangun Hutan Rakyat, Sejahterakan Rakyat” adalah sebuah program pengelolaan lahan milik masyarakat atau kelompok tani yang berada di luar kawasan hutan atau Areal Peruntukan Lain (APL) yang selama ini dalam kondisi terbuka yang tidak dikelola dan menimbulkan kerawanan kebakaran lahan sehingga nanti dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah akan membantu memanfaatkan lahan tersebut sebagai hutan rakyat yang pembiayaannya mulai dari penanaman sampai dengan pemeliharaan tanaman hingga tahun kedua ditangani Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Tengah.

Jenis tanaman terdiri tanaman hutan, buah-buahan dan juga tanaman semusim sehingga

hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan tambahan yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dan menjaga kembali lahan agar tetap hijau dan asri.

Kemudian Program “Menanam Bersama, Buatlah Bumi Tersenyum” merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan mengajak masyarakat mulai dari anak-anak usia dini (SD dan SMP), usia remaja (SMA dan Mahasiswa) serta pegawai dan masyarakat umum untuk ikut serta menanam mulai dari lingkungan terkecil sampai skala yang lebih luas.

Program ini telah dijalankan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan penanaman pohon penghijauan di lingkungan SD, SMP, SMA dan juga di lingkungan Kantor Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan termasuk di lingkungan Gereja dan Mesjid serta rumah ibadah lainnya, sekaligus memberikan edukasi tentang cara menanam pohon yang baik. “Program ini diharapkan dapat memunculkan rasa tertarik dan kecintaan kita dalam menanam dan memelihara pohon sehingga lingkungan menjadi hijau, asri dan ramah sehingga memberikan senyum pada Bumi Tambun Bungai tercinta ini”, kata Sugianto Sabran.***



PHI 2019 Dorong Perempuan Berdaya Untuk Indonesia Maju



PALANGKA RAYA – Biro PKP. Peringatan Hari Ibu Ke-91 tahun 2019 diharapkan menjadi titik awal gerakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di tengah permasalahan yang masih dialami perempuan saat ini seperti kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengemukakan hal itu dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri pada Peringatan Hari Ibu Ke-91 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di Aula BAPELKES Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (12/12/2019).

Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjelaskan kembali arahan Presiden tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang menekankan lima isu prioritas. Ke-5 isu prioritas yang harus ditangani itu meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan yang masih dalam usia anak. “Kelima prioritas tersebut akan ditangani

melalui koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, lembaga masyarakat, organisasi perempuan dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan tema PHI 2019 yaitu Perempuan Berdaya, Indonesia Maju,” kata I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Menteri PPA menegaskan untuk mengatasi kekerasan dan perilaku diskriminatif terhadap perempuan memerlukan keterlibatan laki-laki dalam “He for She” menjadi salah satu komitmen global yang harus digelorakan sampai akar rumput.

Peringatan Hari Ibu 2019 juga disemarkan dengan “Pekan Perempuan Berdaya Indonesia Maju” yang memberikan ruang partisipasi dan edukasi serta dukungan masyarakat yang menonjolkan kreativitas dan kearifan lokal yang menyasar generasi muda milenial dengan kemasan kekinian. Kegiatan itu difokuskan untuk mendorong penguatan karakter Perempuan Berdaya melalui kewirausahaan perempuan melalui program kelas vokasi, mentoring dan ekshibisi. Melalui kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pekan Perempuan Berdaya

Indonesia Maju tersebut adalah gerakan bersama menumbuhkan semangat dan motivasi bagi perempuan prasejahtera sebagai pelaku usaha ultramikro melalui perubahan pola pikir dan perilaku, penguatan identitas perempuan berdaya serta kesadaran hak-hak dan peran perempuan dalam ketahanan keluarga termasuk pengembangan wirausaha perempuan yang dapat memberikan sumbangan bagi ekonomi pembangunan.

Sekda Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri se usai menghadiri Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2019 menjelaskan kepada sejumlah awak media bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI akan memberikan Penghargaan Inovasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Indonesia.

Untuk provinsi Kalimantan Tengah terdapat dua Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang masuk dalam The Best 7 dan The Best 17 masing-masing adalah Poklaksar PMEFS (Pramesi Malima Energi Fokus Sejahtera) Palangka Raya dan Proklaksar Tampung Parei Palangka Raya.

PHI Ke-91 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2019 dihadiri Unsur Forkopimda, Pimpinan OPD dan Instansi Vertikal serta Anggota dan Pengurus TP PKK dan Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Tengah.

Peringatan Hari Ibu 2019 Tingkat Provinsi Kalteng ini dimeriahkan dengan berbagai perlombaan terdiri Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat, Lomba Desa Pengelola Terbaik Gerakan Sayang Ibu, Lomba Posyandu Terbaik dan Senam Kreasi serta Lomba Pangan Sukup Simpan. Hadiah bagi pemenang lomba diserahkan Ketua TP PKK Kalteng Nyonya Ivo Sugianto Sabran pada Peringatan HARI Ibu tersebut.***

NATAL Gabungan KORPRI, PHBK dan DAD Kalteng 2019

PALANGKA RAYA-BIRO PKP. Perayaan Natal gabungan keluarga besar KORPRI, PHBK dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah beserta seluruh komponen masyarakat Kalimantan Tengah tahun 2019 digelar secara meriah di lapangan Sanaman Mantikei Palangka Raya, Kamis malam (12/12/2019).

Ribuan warga KORPRI dan masyarakat Kota Palangka Raya berbaur dalam memeriahkan Perayaan Natal di tengah cuaca Kota Palangka Raya yang gerimis dan diselimuti awan mendung itu berlangsung hikmat dan penuh sukacita.

Natal 2019 yang mengusung Tema “Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang” mengacu dari Injil Yohanes 15:14-15 dengan Sub Tema “Eratkan Persahabatan Sebagai Kekuatan Mewujudkan Kalteng BERKAH” itu diharapkan ada kesatupaduan dalam semangat persahabatan untuk mendukung program pembangunan mewujudkan cita-cita mulia Kalteng BERKAH.

Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri yang turut hadir dalam Perayaan Natal tersebut menyampaikan beberapa pesan Gubernur

Kalteng Sugianto Sabran yang menekankan bahwa Pesan Natal yang selalu disampaikan dan diperdengarkan pada Perayaan Natal setiap tahunnya adalah Pesan Perdamaian, Cinta Kasih, Kerukunan dan Persahabatan. “Pesan tersebut selalu relevan dalam sejarah kehidupan umat manusia sepanjang zaman, dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Juga relevan dengan Tema Natal tahun 2019 yang mengingat kondisi bangsa kita saat ini, dimana banyak alasan yang dapat menyebabkan Bangsa Indonesia bisa terpecah oleh konflik dan permusuhan antar sesama anak Bangsa”, tegas Gubernur.

Keragaman adalah keniscayaan yang tak bisa ditolak sebagai kodrat yang harus kita terima. “Dengan demikian, kita mengimani bahwa kemajemukan adalah anugerah Tuhan kepada bangsa, juga kepada Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu marilah kita jadikan keragaman sebagai kekuatan kita yang harus rawat bersama,” jelas Gubernur.

Disebutkan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di berbagai sektor tidaklah mudah mengelola perbedaan dalam kemajemukan

dan menggerakkannya bersama-sama untuk mencapai satu tujuan.

Untuk itu Gubernur mengharapkan para tokoh agama dan umat Kristiani dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari, membawa damai sejahtera serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah melalui tindakan nyata.

Perayaan Natal Gabungan KORPRI, PHBK dan DAD Kalteng yang dimeriahkan oleh artis Nowela yang mengumandangkan lagu-lagu rohani serta puji-pujian 300-an anggota paduan suara dari seluruh denominasi gereja di Kalimantan Tengah ini dihadiri Presiden Konferensi Gereja-Gereja se-Asia Pdt. Willlem T.P Simarmata, Ketua Majelis Sinode GKE Pdt. Wardiman S. Lidim serta Uskup Palangka Raya Monsinyur A.M Sutrisno Atmaka, diakhiri dengan pembagian 250 paket sembako dan pengundian door prize 3 buah sepeda motor.***



GKE Gelar Natal Nasional Pertama 2019 Di Palangka Raya

Palangka Raya – Biro PKP. Natal Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) yang digelar di Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya, Senin 2 Desember 2019 merupakan Natal Nasional GKE Pertama yang dihadiri ribuan Jemaat GKE dari berbagai daerah Kalimantan dan dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Sugianto Sabran mengapresiasi kegiatan kerohanian tersebut sebagai hal yang positif dalam rangka membangun keimanan dan ketaqwaan umat Kristiani kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mendukung dan membangun kebersamaan antar umat beragama di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah sehingga tercipta kerukunan antar dan intern umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan dalam bingkai NKRI ini sangat membutuhkan kondisi yang aman dan tenteram. Demikian juga pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan dengan baik apabila kondisi masyarakatnya dalam keadaan damai dan tenteram. “Ini semua akan tercipta apabila adanya kebersamaan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa”, tegas Sugianto Sabran di hadapan ribuan umat Kristiani pada perayaan Natal Nasional GKE tersebut.

Sugianto Sabran dalam kesempatan tersebut membeberkan Visinya yaitu Kalteng Maju, Mandiri dan Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok,

Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis) yang dijabarkan ke dalam 8 Misi yaitu Pemantapan Tata Ruang Wilayah, Pengelolaan Infrastruktur, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai, Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, Pemantapan Tatakelola Pemerintah Daerah, Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Daerah.

Visi dan Misi ini dapat tercapai apabila didukung oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah termasuk umat Kristiani dalam menjaga kebersamaan antar umat beragama di Kalimantan Tengah serta memperhatikan dinamika perubahan sosial dan politik yang berkembang selama ini yang sangat berpotensi mempengaruhi nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. “Ini semua harus dapat diantisipasi serta direspon dengan baik dan bijaksana. Jangan sampai budaya nenek moyang kita yang positif seperti Huma Betang menjadi pudar dan tidak kita kembangkan menjadi prinsip hidup kita selaku orang Dayak dan orang-orang yang hidup di tanah Dayak Bumi Tambun Bungai dalam bingkai NKRI ini”, terang Sugianto Sabran.

Untuk itu Sugianto Sabran mengharapkan segenap Pengurus dan Warga Gereja Kalimantan Evangelis agar dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan hak dan kewajibannya sebagai warga bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada. “Dalam mengatasi setiap permasalahan tentu diharapkan muncul sikap dan

tindakan mencari solusi terbaik sebagai bentuk kedewasaan berpikir dan bertindak dalam menghadapi berbagai peristiwa yang ada, apalagi kondisi bangsa kita yang multikultur, multi Agama dan heterogenitas dalam banyak aspek kehidupan”, beber Sugianto Sabran.

Upaya mengatasi berbagai permasalahan dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika itu sangat relevan dengan Tema Natal 2019 “HIDUPLAH SEBAGAI SAHABAT BAGI SEMUA ORANG” dan Sub Tema “JADILAH PEMBAWA DAN PELAKU KEDAMAIAN, KEADILAN DAN KERUKUNAN BAGI SEMUA ORANG”. Pada Perayaan Natal Nasional GKE 2019 ini diserahkan 14 unit kendaraan operasional bagi Gereja-Gereja di pedalaman Kalimantan Tengah.

Gubernur juga mengharapkan warga masyarakat termasuk umat Kristiani agar senantiasa menjaga kondisi tetap kondusif terutama dalam menghadapi dan mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020. “Kita juga tetap menjaga agar masyarakat merasa aman dan tidak terganggu dalam beraktifitas serta menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya selalu menyampaikan bahwa kita semua dapat memberikan dukungan serta mengawal setiap program pemerintah yang telah dan akan dilaksanakan agar apa yang menjadi harapan kita semua yaitu peningkatan kualitas pembangunan masyarakat Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Tengah BERKAH”, terang Gubernur. ***

Gubernur Harapkan DWP Kalteng Dapat Menjadi “Center of Excelent”

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Organisasi Dharma Wanita Persatuan (DPW) Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Desember 2019 genap berusia 20 tahun. DPW Provinsi Kalimantan Tengah dalam memasuki usianya yang ke-20 tahun itu telah menjadi Organisasi Wanita yang besar serta mampu menjalankan program kerja organisasi dengan baik sehingga banyak capaian keberhasilan yang dirasakan telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan untuk Kalteng BERKAH.

Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah banyak membuktikan keberhasilannya di bidang pendidikan antara lain meningkatnya peran masyarakat terhadap minat baca/literasi melalui taman/rumah bacaan dan sudut baca.

Demikian juga perannya di bidang ekonomi telah dirasakan oleh anggota DPW dan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi produktif melalui RPL yang ada di Provinsi dan Kabupaten Kotawaringin Timur. “Semoga ke depan lebih

meningkat lagi demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah”, kata Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik, Endang Kusriatun pada peringatan HUT Ke-20 DWP Provinsi Kalimantan Tengah di Gedung Dharma Wanita, Selasa (10/12/2019).

Dikemukakan, Dharma Wanita Persatuan dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 memiliki prospek menjanjikan bagi posisi perempuan sebagai bagian peradaban kemajuan. Potensi perempuan di Kalimantan Tengah merupakan aset berharga yang harus terus dikembangkan guna menyambut tantangan globalisasi dalam rangka ikut serta mengambil peran strategis dalam konstelasi percepatan pembangunan Kalimantan Tengah BERKAH.

Kedepan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui RPJMD dan RENSTRA sebagai arah kebijakan menganggap bahwa kolaborasi program kerja Dharma Wanita Persatuan Prov. Kalteng menjadi isu strategis

untuk dikerjakan bersama dalam rangka mensukseskan “Kerja Bersama Menuju Kalimantan Tengah BERKAH dan Indonesia maju”.

Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan penghargaan dan apresiasinya kepada Pengurus DWP Provinsi Kalimantan Tengah atas kerja kerasnya selama ini. “Untuk itu saya kembali mengingatkan kepada pengurus dan seluruh anggotanya agar selalu kompak dan memiliki Visi yang sama serta menumbuhkan semangat yang tinggi untuk meningkatkan kualitas dan potensi diri masing-masing sehingga kinerja kita dalam kolaborasi ini lebih optimal dengan tujuan akhir organisasi DWP Prov. Kalteng dapat menjadi “Center Of Excelent” akan terwujud”, kata Sugianto Sabran mengakhiri sambutannya.

Peringatan HUT Ke- 20 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Tengah itu mengangkat tema; “Optimalisasi Program Kerja DPW Sebagai Program Strategis Pemerintah Untuk Suksesnya Percepatan Pembangunan Kalimantan Tengah BERKAH”.***

Jalan Sehat GERMAS Meriahkan HKN Tingkat Provinsi Kalteng 2019

Palangka Raya – Biro PKP. Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-55 tahun Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2019 dimeriahkan dengan Jalan Sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di arena Car Free Day Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu pagi (24/11/2019).

Jalan Sehat GERMAS yang diikuti sekitar 750 peserta dari masyarakat umum, mahasiswa/ mahasiswa Perguruan Tinggi Kesehatan dan Instansi pemerintah Provinsi Kalteng itu dengan kegiatan terdiri Jalan Sehat dan Senam Sehat Bersama, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Donor Darah dan Penyuluhan

Kesehatan. Gubernur dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan ada dua isu utama yang harus diselesaikan terkait pembangunan SDM yang berkualitas yaitu Stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pertama, isu stunting. Kalimantan Tengah bertekad menanggulangi dan menurunkan angka stunting melalui aksi “Ela Hindai Stunting” atau jangan lagi kita temukan kasus stunting di Kalteng. Kedua, Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah provinsi Kalteng memberikan perhatian besar terhadap pelayanan kesehatan di provinsi

Kalteng terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan memberikan KARTU KALTENG BERKAH kepada 71.371 peserta di Kabupaten dan Kota se-Kalteng. “Dengan berkoordinasi bersama antara pemerintah dan masyarakat luas melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS ini, mari kita lakukan aksi ELA HINDAI STUNTING demi Kalteng BERKAH” kata Sugianto Sabran.

Gubernur mengajak masyarakat menyukseskan GERMAS dalam rangkaian HKN 2019. “Kita mengajak masyarakat agar gemar beraktifitas fisik seperti olahraga termasuk pemeriksaan penyakit tidak menular yang merupakan wujud GERMAS dan cek kesehatan secara rutin”, ujar Sugianto Sabran.***

